



JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM NASIONAL



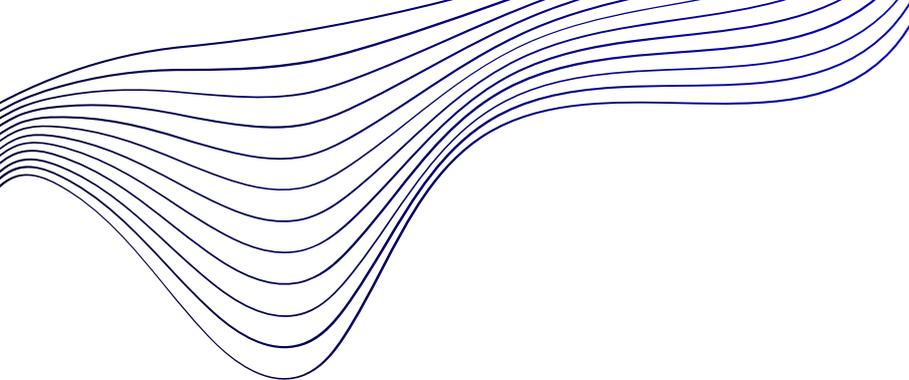
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DIGITALISASI

UNTUK REFORMASI HUKUM



LAPORAN TAHUNAN 2020
JDIH MARVES



Digitalisasi

UNTUK REFORMASI HUKUM

“ JDIH Marves hadir sebagai sarana penyampaian informasi hukum yang mampu menyajikan secara lengkap dari tahap perencanaan peraturan perundang-undangan, tahapan pembahasan rancangan, lacak usulan rancangan, penyebarluasan peraturan, dan fasilitas layanan bantuan hukum serta JDIH Marves kini sudah bisa di download di play store dan app store

”

Budi Purwanto

Prestasi yang diraih JDIH Marves

Tahun 2020 JDIH Marves berhasil memperoleh prestasi sebagai JDIH terbaik ke V tingkat Kementerian, keberhasilan ini menjadi motivasi untuk dapat terus melakukan perbaikan dan perubahan yang lebih baik lagi kedepannya sehingga JDIH Marves nantinya bisa memperoleh peringkat ke I tingkat Kementerian

JDIH AWARD 2020

Peringkat terbaik ke V tingkat Kementerian





DAFTAR ISI

4

Organisasi

8

Sumber Daya Manusia

14

Koleksi Dokumen Hukum

17

Teknis Pengelolaan

25

Sarana dan Prasarana

33

Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi

36

Kegiatan Pengelolaan JDIH

54

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi

Visi

Terwujudnya dokumentasi dan informasi hukum di bidang kemaritiman dan investasi yang lengkap, akurat, mudah dan cepat dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi

Misi

1. Meningkatkan kelengkapan dokumen hukum di bidang kemaritiman dan informasi hukum
2. Mengoptimalkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi
3. Meningkatkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang kemaritiman dan investasi
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum

ORGANISASI JDIH MARVES

Informasi mengenai JDIH Marves

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut JDIH Marves merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Unit yang mengelola JDIH Marves adalah Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Advokasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum.

Dasar hukum pelaksanaan JDIH Marves diatur dengan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 119/S Tahun 2020 tentang Tim Kerja Penyusunan Pedoman dan Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

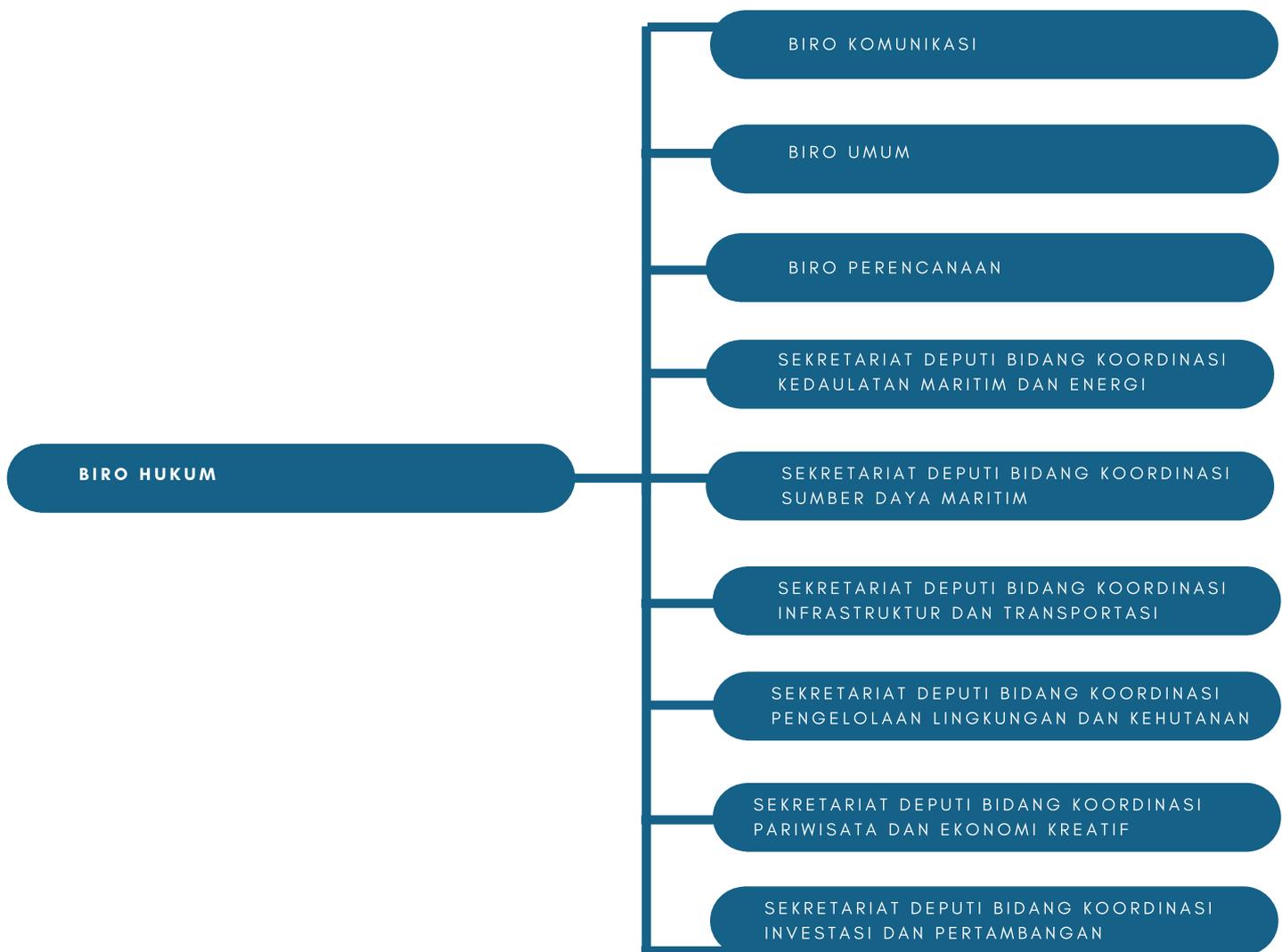
STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM

Struktur organisasi Biro Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai berikut:



STRUKTUR PENGELOLA JDIH KEMENKO MARVES

Struktur organisasi Pengelola JDIH Kemenko Marves berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, sebagai berikut:



SUMBER DAYA MANUSIA

Data informasi SDM yang mengelola JDIH Marves

JDIH Marves menjadi struktur organisasi pada tahun 2019 bulan Mei yaitu pada saat terjadi perubahan struktur organisasi Biro Hukum.

Sebelum terjadinya perubahan struktur tersebut, JDIH dikelola oleh anggota tim JDIH yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelola Konten Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Jumlah personil yang mengelola JDIH Marves saat ini hanya terdiri dari Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum, Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum dan 1 (satu) staf pendukung Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Jika dilihat dari jumlah yang mengelola JDIH Marves dapat dikatakan sangat sedikit, namun kondisi tersebut tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH.

Kegiatan pengembangan SDM yang telah dilaksanakan JDIH Marves selama tahun 2020 yakni 1) bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan hukum oleh Pustakawan BPHN; 2) bimbingan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh JDIHN; 3) pendampingan dalam pencatatan, penyusunan dan pengarsipan buku hukum; 4) bimbingan teknis penyusunan laporan tahunan JDIH Marves; 5) Studi banding dengan JDIH Kementerian Keuangan; 6) Studi banding dengan JDIH BIG; 7) Studi banding dengan JDIH Kota Batam



Budi Purwanto

Kepala Biro Hukum

Pangkat/Gol. Ruang

Pembina Utama Madya/IV.d

Kewarganegaraan

Indonesia

Pendidikan

S2 Ilmu Hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM"

Riwayat Pekerjaan

Kepala Biro Hukum

Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim

Kabag Hukum dan Kerja Sama

Kasubbag Peraturan Transportasi Udara

Kasubbag Multilateral

Kasubbag Kerja Sama Multilateral

Kasubbag Rancangan III

Kurniawan B. Prianto

Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum



Pangkat/Gol. Ruang

Pembina/IV.a

Kewarganegaraan

Indonesia

Pendidikan

S2 Manajemen Informatika

Universitas Gunadarma

S1 Perbankan

Universitas Gunadarma

S1 Hukum Perdata

Universitas Borobudur

Riwayat Pekerjaan

Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum

2019-sekarang

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

2015-2019

Satuan Tugas Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

2015

Satuan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

2010-2015

Ryan Pasca Pratama

Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum



Pangkat/Gol. Ruang

Penata/III.c

Kewarganegaraan

Indonesia

Pendidikan

S2 Ilmu Administrasi

STIA LAN

D4 Politik Pemerintahan

IPDN

Riwayat Pekerjaan

Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

2019-sekrang

Sekretaris Pimpinan Sesmenko

2016-2019

Analisis Pembangunan Desa

2014-2016

Nanda Manarfa Az Zahra

Pelaksana Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum



Kewarganegaraan

Indonesia

Pendidikan

S1 Sistem Informasi

Universitas Gunadarma

Riwayat Pekerjaan

Pelaksana Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum,
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

2019-sekarang

Pelaksana Bagian Data dan Sistem Informasi,
Kemenko Bidang Kemaritiman

2018-2019

PT. Grab Taxi Indonesia - Grab For Business

2017-2018

ANGGARAN JDIH

Jumlah anggaran pengelolaan JDIH Tahun
Anggaran 2020

JDIH Marves tahun anggaran 2020 memiliki anggaran sebesar Rp.500.000.000,- dimana komponen utama dari anggaran tersebut yaitu: 1) pengembangan website JDIH Marves; 2) pembuatan aplikasi mobile JDIH berbasis android dan iOS; 3) pembuatan videografis dan infografis; 4) rapat perencanaan, monitoring, evaluasi dan pembinaan serta peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum.



KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

Jumlah, ragam dan bentuk koleksi yang dimiliki antara lain jumlah koleksi yang dimiliki baik koleksi fisik maupun yang telah diunggah dalam aplikasi website JDIH Marves

Peraturan Tingkat Pusat

Jenis dan Jumlah Peraturan di tingkat Pusat



UNDANG-UNDANG

62

DOKUMEN



PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-
UNDANG

2

DOKUMEN



PERATURAN PEMERINTAH

81

DOKUMEN



PERATURAN PRESIDEN

36

DOKUMEN



INSTRUKSI PRESIDEN

7

DOKUMEN



KEPUTUSAN PRESIDEN

3

DOKUMEN

Peraturan di lingkungan Kemenko Marves

Jenis dan Jumlah Peraturan di lingkungan Kemenko Marves



PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR

47

DOKUMEN



SURAT EDARAN

90

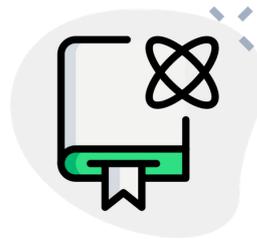
DOKUMEN



INSTRUKSI MENTERI
KOORDINATOR

-

DOKUMEN



KEPUTUSAN KPA

46

DOKUMEN



KEPUTUSAN MENTERI

447

DOKUMEN

Kliping Koran Bidang Hukum & Buku Buku Hukum

Jumlah Kliping Koran Bidang Hukum dan Buku-buku Hukum



KLIPING KORAN BIDANG HUKUM

19

KLIPING



BUKU HUKUM

308

BUKU

TEKNIS PENGELOLAAN

Penerapan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

Dalam rangka mengembangkan pengelolaan JDIH Marves, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah membuat standar pengelolaan JDIHN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Standar tersebut dijadikan pedoman dalam pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi JDIH Marves. Berikut penyesuaian standar yang telah diatur di dalam website JDIH Marves, antara lain:

1. Penyesuaian standar website JDIH

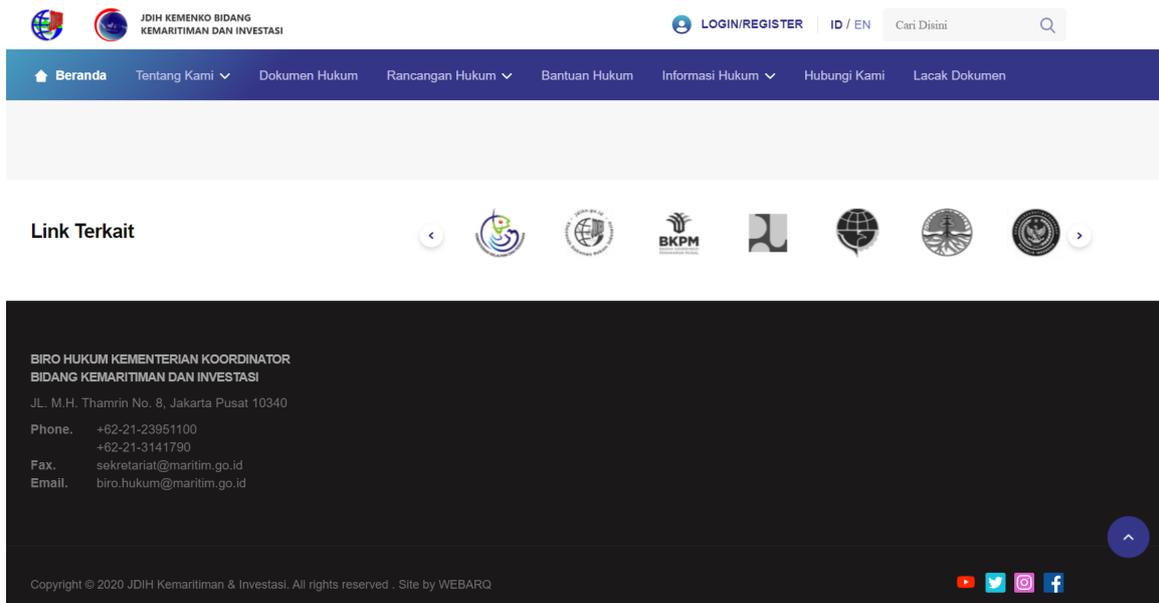
a. Alamat website (domain name) merupakan subdomain dari website utama instansi:

<https://jdih.maritim.go.id/>

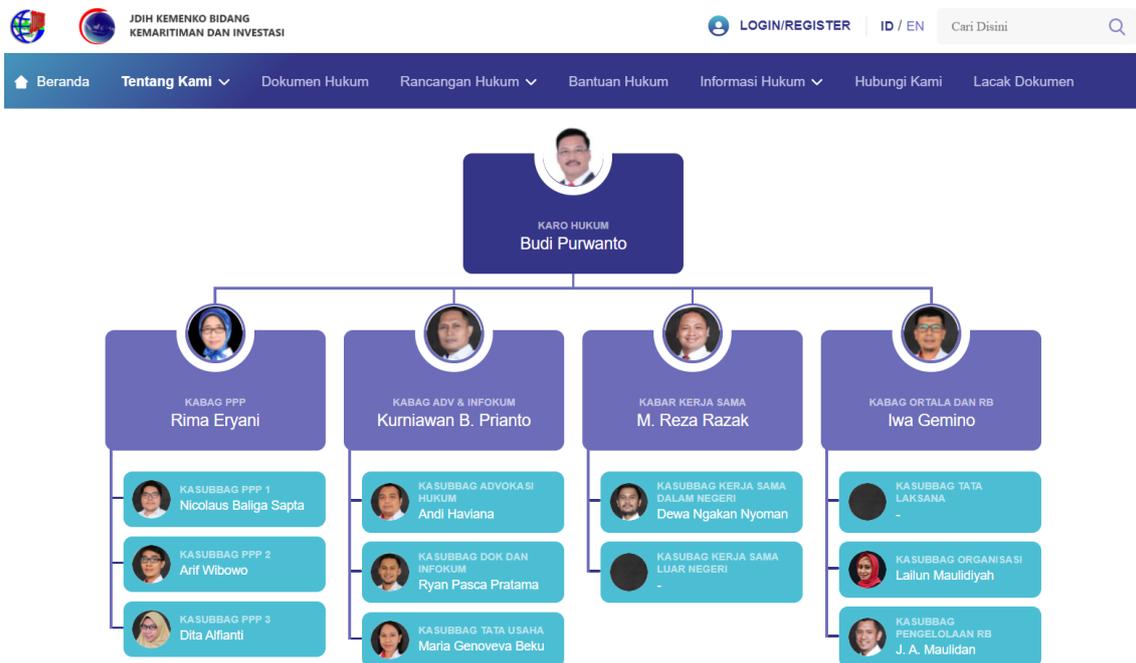
b. Membuat logo JDIHN di pojok kiri atas layar



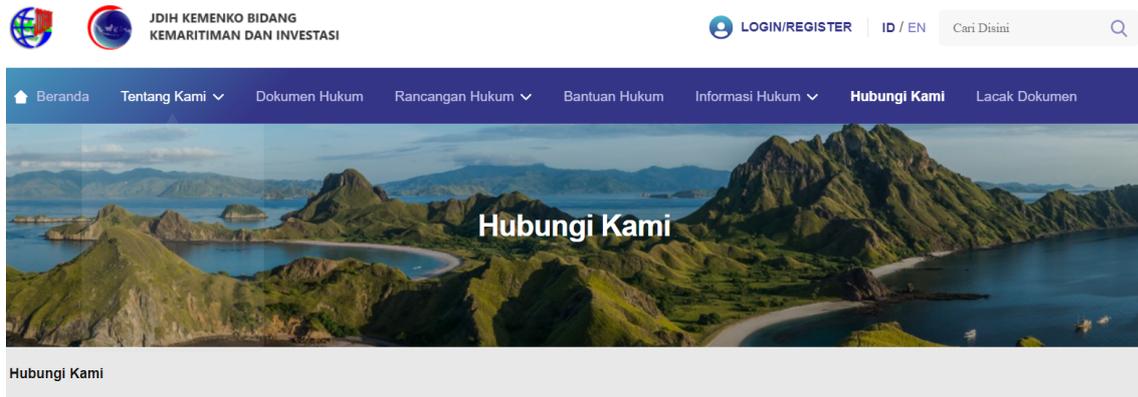
c. Menampilkan daftar link /alamat website anggota jaringan yang ada di bawah instansinya



d. Struktur Organisasi Pengelola JDIIH



e. Alamat dan Kontak Person Pengelola JDIH



Hubungi Kami

Jika anda mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan saran anda yang positif sangat bermanfaat bagi perubahan dan kemajuan kami

The image displays a contact form on a website. On the left side, there is a vertical blue bar with white text. The text includes the name of the ministry, its address (Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340), and contact information: telephone (+62 8118 60 4321), fax (sekretariat@maritim.go.id), and email (biro.hukum@maritim.go.id). The main part of the form is white and contains four input fields: "Nama*" (with placeholder "Masukkan Nama Anda"), "Email*" (with placeholder "Masukkan Email Anda"), "Telepon*" (with placeholder "Masukkan Telepon Anda"), and "Pesan*" (with placeholder "Tuliskan Pesan Anda"). At the bottom left of the form is a checkbox labeled "Saya bukan robot" next to a reCAPTCHA logo. At the bottom right is a blue button with the text "KIRIM PESAN".

f. konten/isi dalam aplikasi harus berisi Dokumen Hukum

1 dari 47 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI BERLAKU

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 9 Tahun 2020
Tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kelengkapan Data: Abstrak Video Infografis Katalog Unduh

2 dari 47 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI BERLAKU

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 8 Tahun 2020
Tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan dan Kelompok Kerja

Kelengkapan Data: Infografis Katalog Unduh

g. penelusuran (search engine)

JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI LOGIN/REGISTER ID / EN Cari Disini

Beranda Tentang Kami Dokumen Hukum Rancangan Hukum Bantuan Hukum Informasi Hukum Hubungi Kami Lacak Dokumen

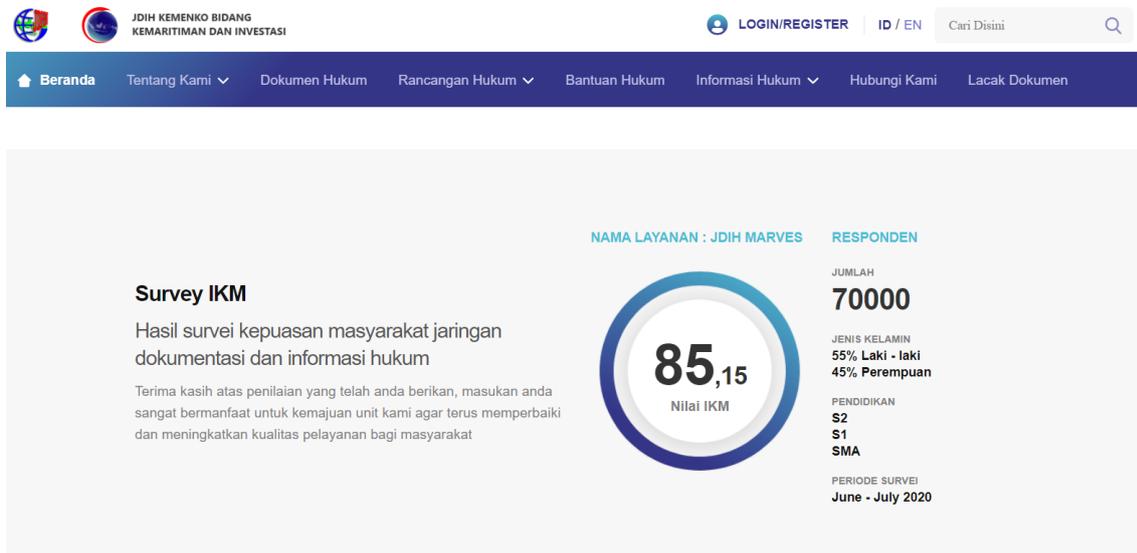
Dokumen Hukum

Dokumen Hukum

Nama Dokumen Jenis Dokumen Tema Peraturan Tahun

Nama Dokumen Peraturan Menteri Semua Tema Pilih Tahun Cari

h. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pemanfaatan aplikasi JDIH



2. Standar Metadata

a. Standar Metadata Peraturan yang digunakan:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 9 Tahun 2020
tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi



Lembar Kerja Peraturan

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Peraturan	9 Tahun 2020
Jenis/Bentuk Peraturan	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	Permenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	26 Oktober 2020
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	2 November 2020
Subjek	Organisasi - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Status Peraturan	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara
Lampiran	-

TUTUP JENDELA

b. Standar Metadata Monografi Hukum yang digunakan:



Prof. Dr. jur. Andi Hamzah

Hukum Acara Pidana Indonesia

Edisi Kedua

SINAR GRAFIKA

Tersedia

Hukum Acara Pidana Indonesia

Oleh: Andi Hamzah

Deskripsi

Hukum Acara Pidana Indonesia, Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berarti pertama kalinya Indonesia melakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Lebih daripada itu, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali.

Detail Informasi

Tipe Dokumen	Monografi Hukum
Judul	Hukum Acara Pidana
T.E.U Orang/Badan	Hamzah, Andi
Nomor Panggil	343.13 HAM h
Cetakan/Edisi	Cet. 6
Tempat Terbit	Jakarta
Penerbit	Sinar Grafika
Tahun Terbit	2012
Deskripsi Fisik	xvi, 328 hlm.,; 21 cm
Subjek	Hukum Acara
ISBN/ISSN	ISBN 978-979-007-064-6
Bahasa	Indonesia
Bidang Hukum	Hukum Pidana
Nomor Induk Buku	-
Lokasi	Jakarta
Lampiran	full text buku

Selain menerapkan pedoman dokumen dan informasi hukum berdasarkan pedoman yang telah dibuat oleh Pusat Jaringan, JDIH Marves juga memiliki SOP pengolahan dokumen dan informasi hukum yang diterapkan di lingkungan Kemenko Marves, antara lain:

1. SOP Pelaksanaan Pelayanan Informasi Hukum Terbuka
2. SOP Pelaksanaan Pelayanan Informasi Hukum Tertutup
3. SOP Monitoring Pengelolaan JDIH
4. SOP Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan
5. SOP Pembuatan Katalog Monografi Hukum
6. SOP Pembuatan Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya
7. SOP Penyusunan Indeks Majalah Hukum
8. SOP Pembuatan Indeks Kliping Koran
9. SOP Pembuatan Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya
10. SOP Pengusulan Pembuatan Videografis
11. SOP Pengusulan Pembuatan Infografis

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Website JDIH Marves telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dengan melakukan penambahan fitur-fitur yang dapat mempermudah penemuan kembali informasi dan pelayanan informasi hukum.

Dari tampilan beranda JDIH Marves sudah terlihat pada Banner yang ada yaitu fitur pencarian, dari fitur tersebut pencari dokumen dapat menuliskan peraturan apa saja yang sedang ingin dicari tanpa perlu mengetahui secara detail nama dokumen, tahun, ataupun jenis dokumen apa, dengan fitur ini dapat membaca apa saja yang diketik pada kolom pencarian dokumen.

Selain itu juga pada tampilan beranda juga disediakan fasilitas pencarian peraturan terbaru, sehingga melalui beranda awal si pencari informasi dapat mengetahui bahwa ada peraturan terbaru yang telah tersedia



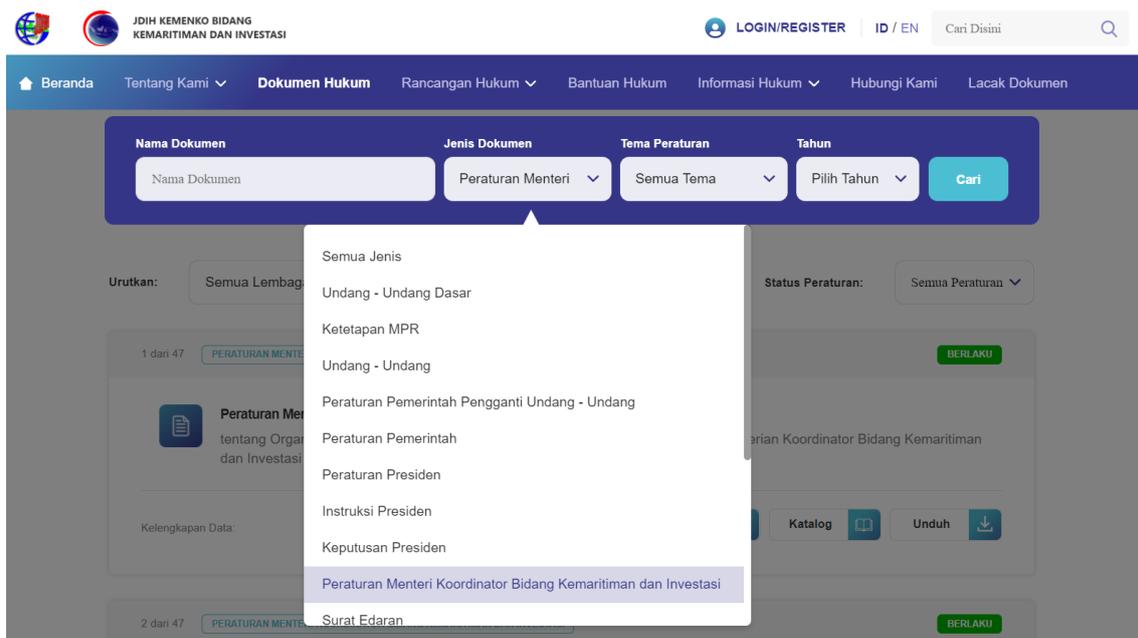
Peraturan Terbaru
[Lihat Semua](#)

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemeritiman dan Investasi No 9 Tahun 2020
[PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI](#)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2020
[PERATURAN PEMERINTAH](#)

Selain pada tampilan Beranda, fitur pencarian dokumen juga tersedia pada fitur Dokumen Hukum. Fitur Dokumen Hukum ini berfungsi untuk mencari semua Dokumen Hukum yang dibutuhkan.

Pencarian dokumen dapat dilakukan dengan menuliskan kata kunci pencarian apa saja yang dapat dituliskan, dan untuk memberikan kemudahan dalam pencarian juga di berikan pencarian berdasarkan jenis dokumen. Jenis dokumen antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Presiden
7. Instruksi Presiden
8. Keputusan Presiden
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
10. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
12. Surat Edaran
13. Putusan Pengadilan
14. Yurisprudensi
15. Naskah Kerja Sama
16. Naskah Akademis
17. Pengumuman

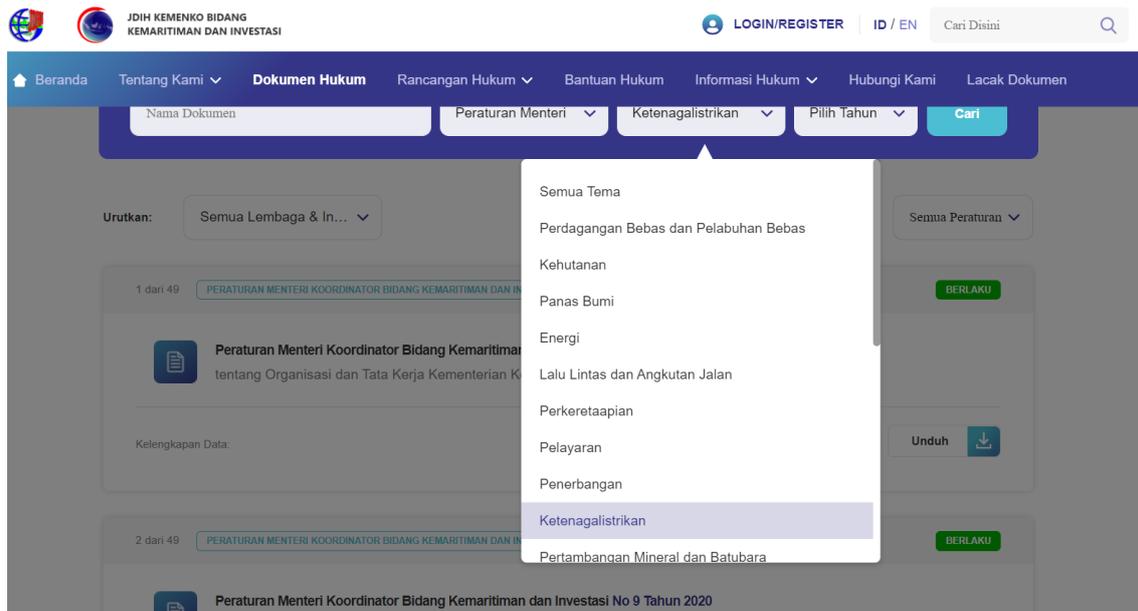


Untuk memberikan kemudahan pencarian dokumen berdasarkan tema, JDih Marves juga telah menyediakan fitur Tema Peraturan. Tema Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan saat mencari peraturan yang memiliki tema peraturan yang sama sehingga memudahkan untuk melakukan analisis dan evaluasi peraturan sejenis untuk menghindari tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.

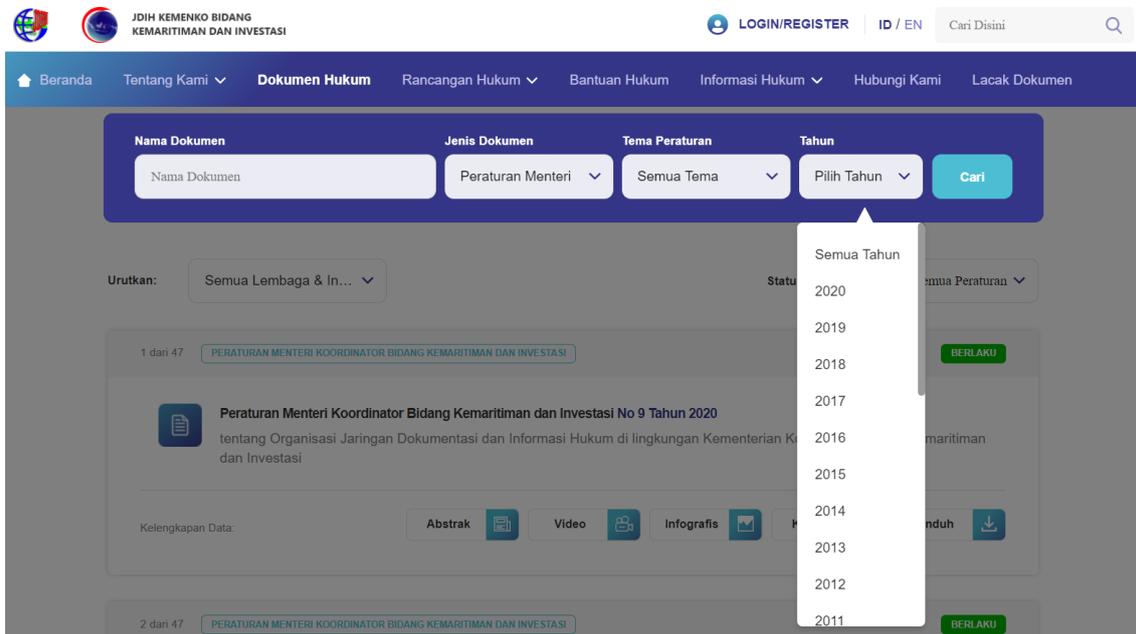
Berikut tema-tema yang telah disediakan di website JDih, antara lain:

1. Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
2. Kehutanan
3. Panas Bumi
4. Energi
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Perkeretaapian
7. Pelayaran
8. Penerbangan
9. Ketenagalistrikan
10. Pertambangan Mineral dan Batubara
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Pengelolaan Sampah
13. Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
14. Sumber Daya Air
15. Jasa Konstruksi
16. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

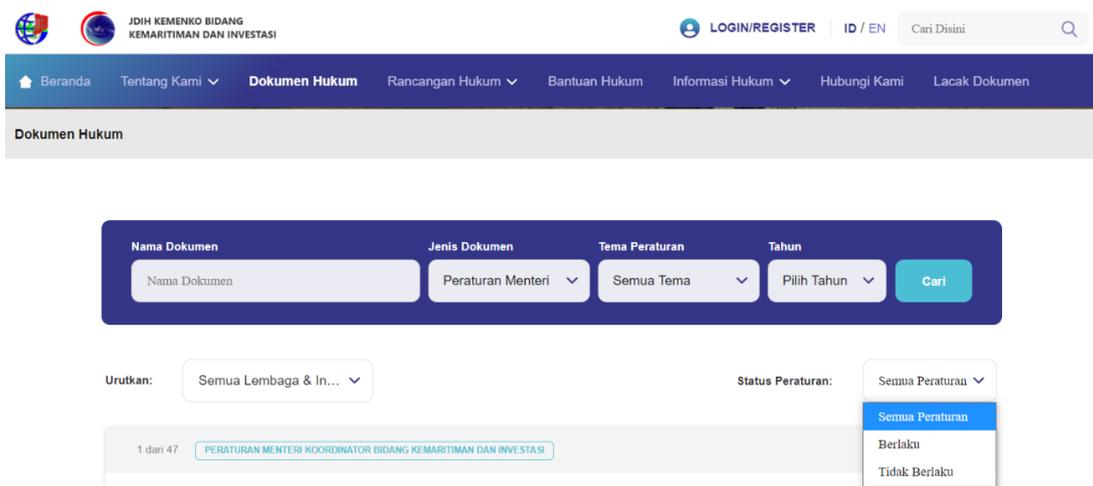
17. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
18. Kelautan
19. Perikanan
20. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
21. Ketenaganukliran



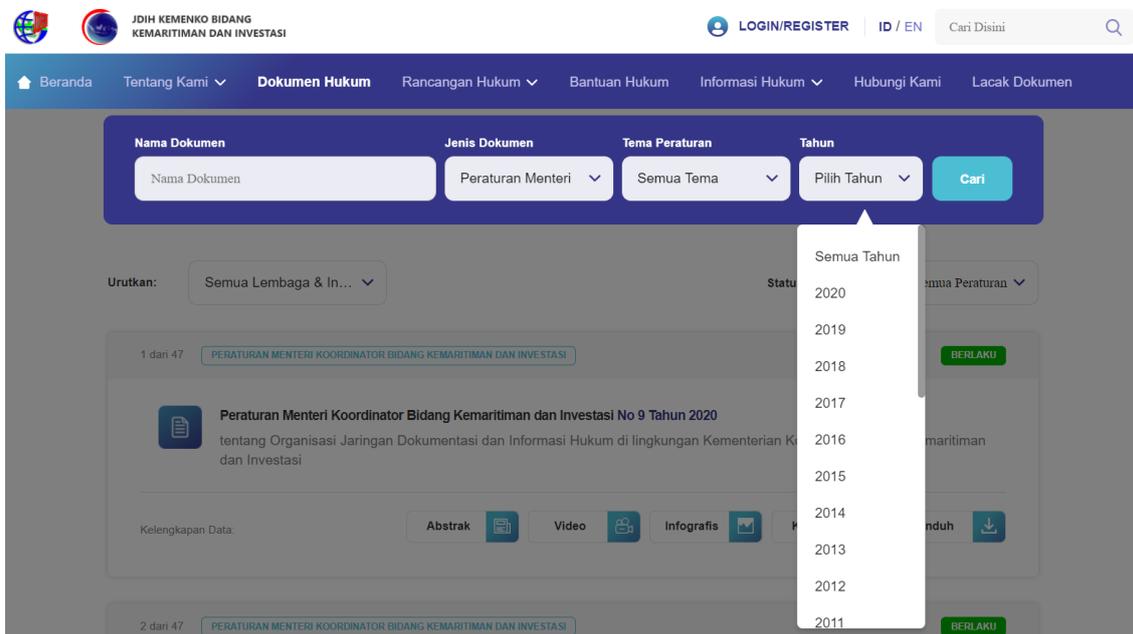
Untuk memperkecil area pencarian, JDIH Marves juga memberikan pencarian berdasarkan tahun yang dibutuhkan sehingga dapat mengetahui ketersediaan peraturan pada tahun-tahun tertentu



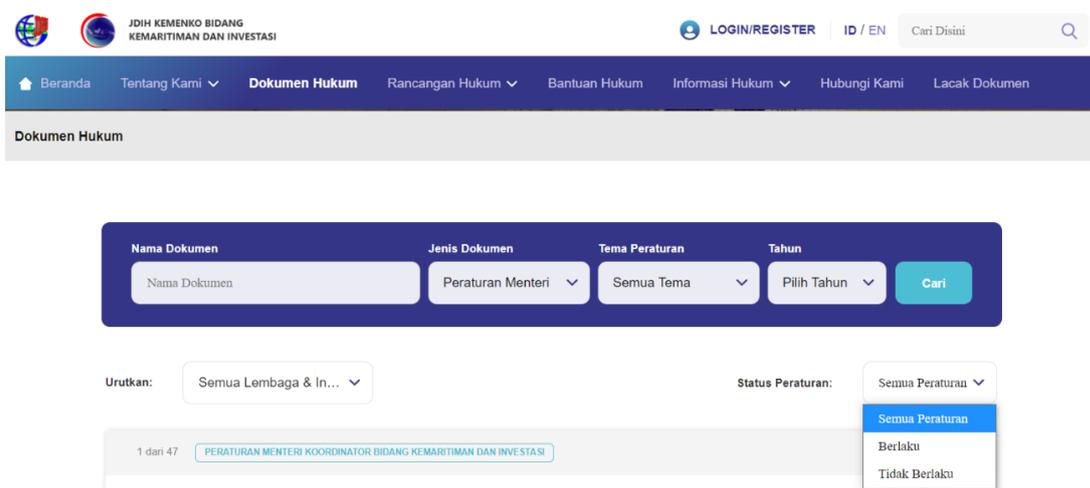
Untuk memperkecil area pencarian juga, JDIH Marves memberikan pencarian berdasarkan status peraturan, yaitu berlaku dan tidak berlaku, sehingga pencari dokumen dapat mencari berdasarkan dokumen yang berlaku saja atau yang tidak berlaku saja



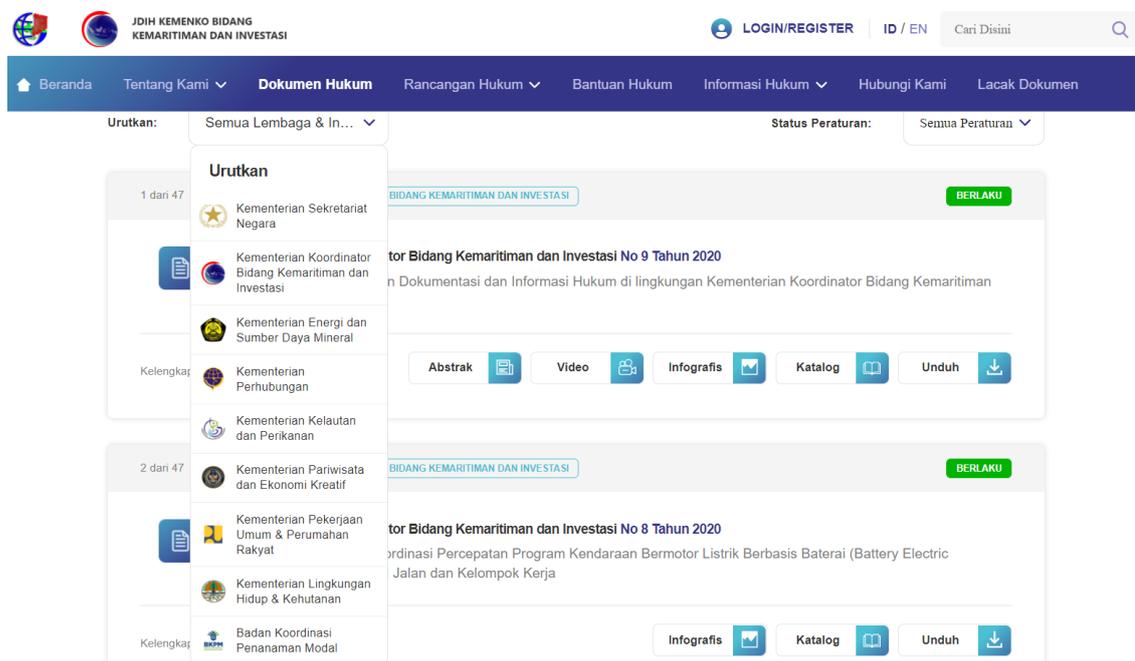
Untuk memperkecil area pencarian, JDIH Marves juga memberikan pencarian berdasarkan tahun yang dibutuhkan sehingga dapat mengetahui ketersediaan peraturan pada tahun-tahun tertentu



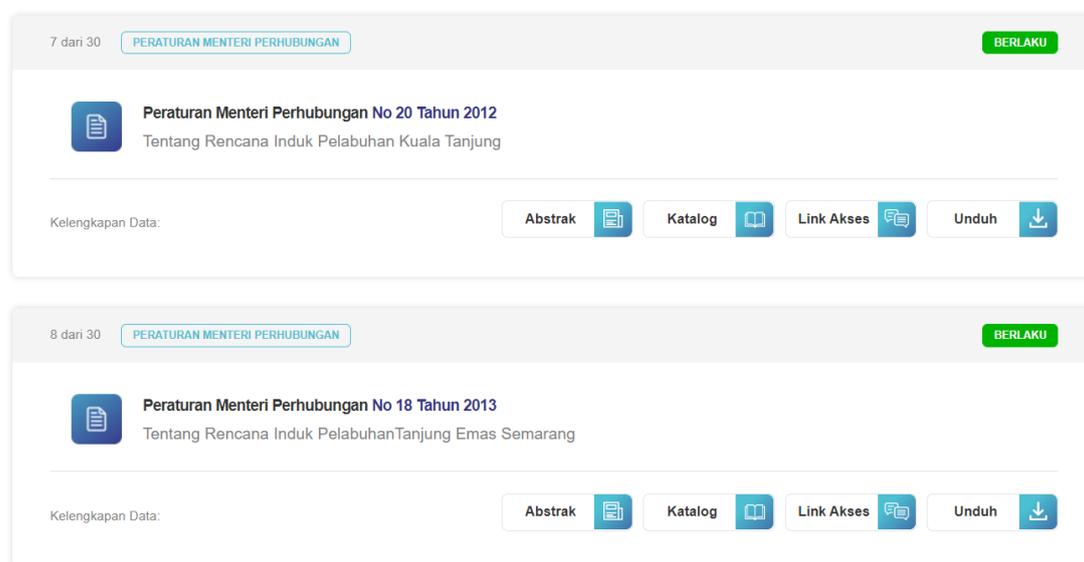
Untuk memperkecil area pencarian juga, JDIH Marves memberikan pencarian berdasarkan status peraturan, yaitu berlaku dan tidak berlaku, sehingga pencari dokumen dapat mencari berdasarkan dokumen yang berlaku saja atau yang tidak berlaku saja



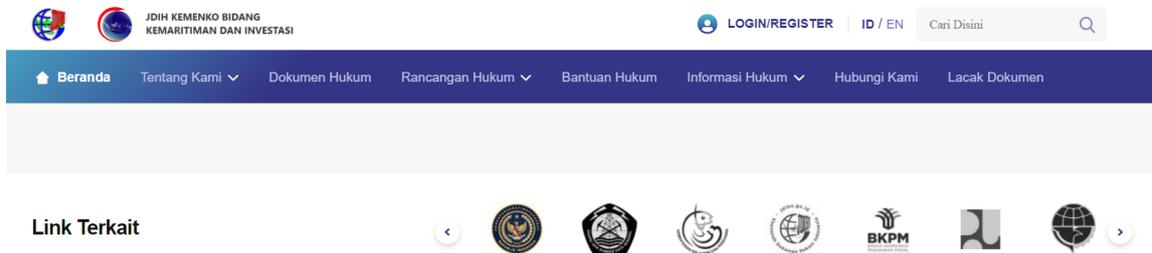
JDIH Marves juga menyediakan pencarian peraturan berdasarkan 7 kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian peraturan kementerian teknis yang masuk dalam tema-tema peraturan.



Untuk memberikan kemudahan terhubung langsung dengan peraturan pada 7 (tujuh) JDIH kementerian/lembaga, JDIH Marves juga memberikan link akses ke peraturan JDIH pada 7 (tujuh) kementerian/lembaga.



Dan jika pencari informasi ingin mencari lebih detail peraturan pada 7 (tujuh) kementerian/lembaga yang di koordinasikan oleh Kemenko Marves, JDIH Marves menyediakan link akses yang dapat langsung menuju ke 7 (tujuh) JDIH kementerian/lembaga dalam koordinasi Kemenko Marves.



SARANA PRASARANA

Untuk penunjang pengelolaan dokumen dan informasi hukum

Untuk menunjang kinerja anggota JDIH Marves dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum JDIH Marves telah menyediakan, antara lain:

a. Ruang baca



b. Ruang kerja,



c. Ruang penyimpanan koleksi



d. Printer,



e. Scanner,



f. Mesin foto copy



KEGIATAN PENGELOLAAN JDIH

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pengelolaan JDIH dalam rangka memperkuat dan mengembangkan pengelolaan JDIHN serta koordinasi kerja sama dengan pusat JDIHN maupun sesama anggota JDIHN

Kegiatan yang dilaksanakan JDIH Marves dalam rangka memperkuat dan mengembangkan pengelolaan JDIHN dengan pusat JDIHN maupun anggota JDIHN, sebagai berikut:

1. Rapat Pengembangan Website JDIH Kemenko Marves pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



2. Pemaparan calon pengembang Website JDIH Kemenko Marves oleh *Web Architect Technology* (WEBARQ) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



3. Kunjungan ke Perpustakaan BPHN pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 di Perpustakaan BPHN Kementerian Hukum dan HAM



4. Rapat Sounding Market dalam rangka Pengadaan Website JDIH Kemenko Marves pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves
5. Rapat Persiapan Pengadaan Website dan Pembangunan Aplikasi JDIH Kemenko Marves pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves

- Rapat Kick Off Meeting Pengadaan Website dan Pembangunan Aplikasi JDIH Kemenko Marves pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



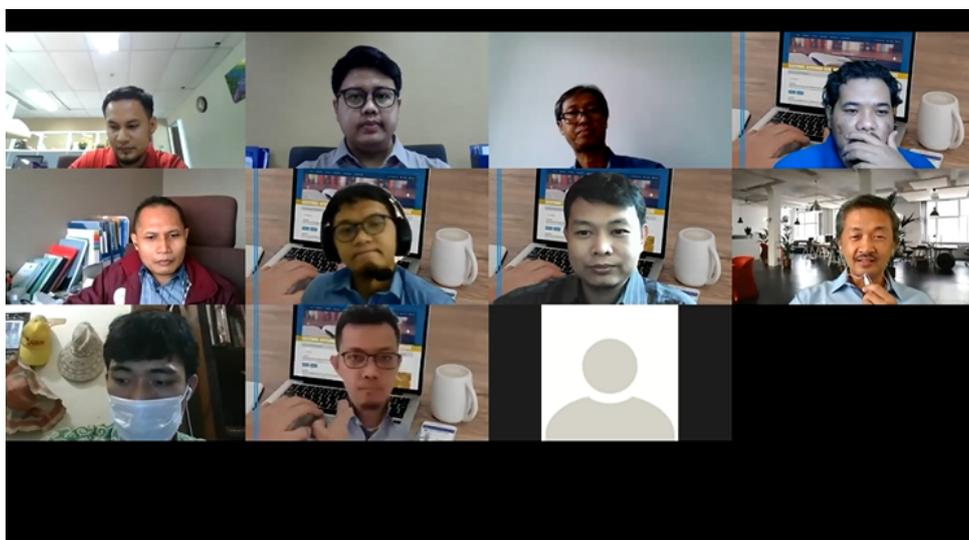
- Rapat Penguatan Penyampaian Informasi Hukum melalui Media Sosial pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



8. Rapat Penyampaian Mockup Homepage Website JDIH Kemenko Marves pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di Ruang Rapat Lt. 21 Kemenko Marves



9. Rapat studi banding dengan melihat inovasi Biro Hukum Kementerian Keuangan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 melalui Zoom Meeting



10. Rapat saran dan tanggapan atas konsep website JDIH Marves pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



11. Rapat progres dan percepatan pengembangan website dan aplikasi mobile JDIH Marves pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves

12. Menerima pemberian buku-buku hukum dari Perpustakaan BPHN pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 di BPHN Kementerian Hukum dan HAM



13. Rapat integrasi JDIH Marves dengan JDIH di 7 Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



14. Bimbingan Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di Harris Hotel and Convention Bekasi



15. Soft Launching Website JDIH Kemenko Marves pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 melalui Zoom Meeting



16. Grand Launching Website JDIH Kemenko Marves pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2020 di Hotel Grand Inna Yogyakarta



17. Rapat Teknis Penyusunan Katalog, Nomor Panggil Buku dan Pembuatan Label Buku



18. Bimtek Penyusunan Laporan Tahunan JDIH Marves



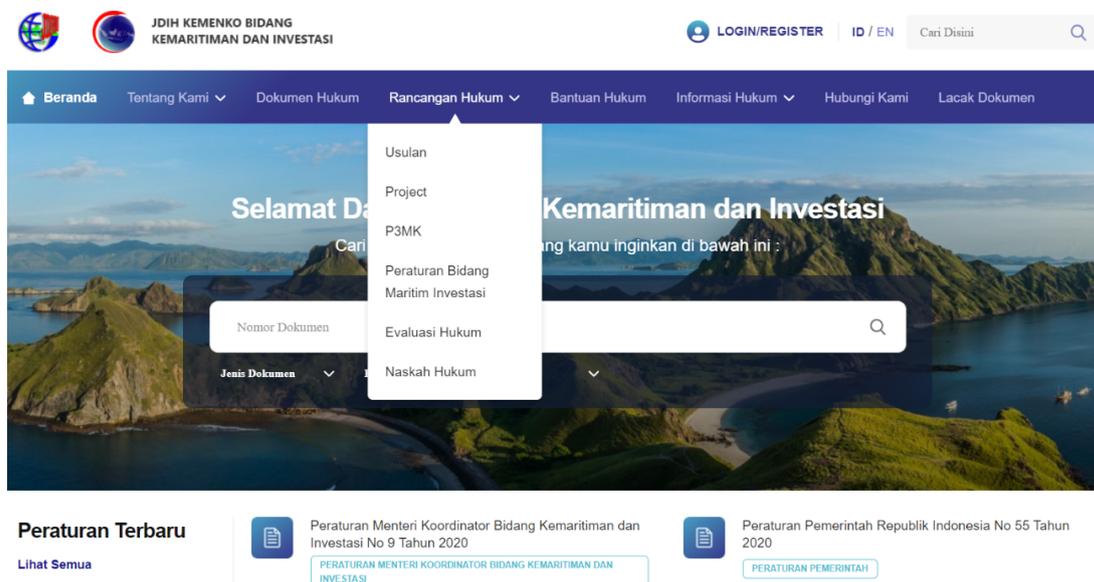
INOVASI PENGELOLAAN JDIH

Inovasi yang dilaksanakan pengelolaan JDIH dalam rangka memperkuat dan mengembangkan pengelolaan JDIHN serta koordinasi kerja sama dengan pusat JDIHN maupun sesama anggota JDIHN

Inovasi yang dilaksanakan JDIH Marves dalam rangka memperkuat dan mengembangkan pengelolaan JDIHN dengan pusat JDIHN maupun anggota JDIHN, menjadikan JDIH Marves sebagai *one stop service* pelayanan informasi hukum yaitu JDIH tidak hanya menyampaikan dokumen hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan tetapi menyajikan informasi suatu peraturan perundang-undangan dari sejak tahap usulan, pembahasan, monitor proses penyelesaian (tracking proses), evaluasi peraturan, penyebarluasan dokumen hukum, dan fasilitas layanan bantuan hukum kepada para Pegawai di lingkungan Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi serta JDIH Marves dapat di download melalui play store dan app store.

a. Rancangan Hukum

Fitur Rancangan Hukum merupakan fitur yang berfungsi untuk menyiapkan rancangan suatu peraturan perundang-undangan dari mulai usulan, rancangan, pembahasan, dan tracking proses usulan rancangan peraturan perundang-undangan.



Usulan rancangan peraturan perundang-undangan yang masuk ke Biro Hukum akan di input ke dalam sistem yang disebut usulan. Untuk kemudian usulan tersebut akan dilakukan analisa dan dievaluasi untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan.

Daftar Usulan Project

[+ Buat Usulan Project](#)

No	Nomor Project	Nama Project	Kategori	Tanggal Usulan	Status
1	34157053	Keputusan Menko tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Koordinator tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Menteri Non TNI	Naskah Hukum	20 May 2020	Menunggu Review
2	34157052	Keputusan Menko tentang Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Maritim	Naskah Hukum	09 Apr 2020	Menunggu Review
3	34157051	Keputusan Menko tentang Pokja Peningkatan Produksi Industri Undang Nasional	Naskah Hukum	08 Apr 2020	Menunggu Review
4	34157050	Keputusan Menko tentang Tim Kelompok Kerja Percepatan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2019	Naskah Hukum	30 Mar 2020	Menunggu Review
5	34157049	Keputusan KPA tentang Perubahan Ketiga KPA tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Administrasi Kemkeno Marves nistrasi Nomenklatur Baru	Naskah Hukum	18 May 2020	Menunggu Review

setelah dilakukan analisis dan evaluasi untuk kemudian akan di verifikasi untuk diproses lanjut atau ditolak untuk dilengkapi kekurangan yang ada. Selanjutnya usulan yang disetujui untuk diproses akan masuk ke sistem yang disebut project. Di project ini akan terinformasikan nomor usulan yang dapat digunakan pada saat akan melakukan tracking proses usulan rancangan peraturan dan di project juga dapat terlihat semua status rancangan peraturan yang diajukan.

Tahun Cari Dengan Kata Kunci

Daftar Project

No	Nomor Project	Nama Project	Kategori	Tgl Usulan	Target Penyelesaian	Status
1	34157063	Rancangan Kepsesmenko tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Unit Eselon II lingkup Setmenko	Naskah Hukum	09 Nov 2020	09 Dec 2020	Usulan Diproses
2	34157062	Draft Surat Keputusan Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan SPBE	Naskah Hukum	05 Nov 2020	05 Dec 2020	Usulan Diproses
3	34157061	Rancangan Surat Edaran Sesmenko Marves tentang Pedoman Pelaksanaan	Naskah Hukum	11 Nov 2020	11 Nov 2020	Proses Penetapan

Dari usulan yang telah diterima selanjutnya akan di proses sesuai dengan jenis usulannya antara lain: 1) peraturan di bidang kemaritiman dan investasi; 2) peraturan menteri koordinator; 3) naskah hukum; dan 4) evaluasi hukum. Usulan tersebut selanjutnya dapat di lihat perkembangannya di sistem tracking proses.

Tracking proses merupakan fitur yang berfungsi untuk memberi informasi status perkembangan dari usulan yang disampaikan kepada Biro Hukum. Dari fitur tersebut si pemberi usulan cukup memasukkan nomor usulan yang diberikan Biro Hukum yang dapat diakses melalui website JDIH dengan memasukkan nomor seri yang telah diberikan Biro Hukum, dari situ sudah dapat langsung mengetahui sejauh mana proses usulannya.

The screenshot displays the user interface of the JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) website. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the text 'JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI', and user information 'USER PERANCANGAN' with options for 'Sign out' and 'ID / EN'. A search bar is also present. Below the navigation bar, a menu contains links for 'Beranda', 'Tentang Kami', 'Dokumen Hukum', 'Rancangan Hukum', 'Bantuan Hukum', 'Informasi Hukum', 'Hubungi Kami', and 'Lacak Dokumen'. The main content area is titled 'Lacak Dokumen Pengajuan Anda' and provides instructions on how to track a document by entering its serial number. A form with the label 'Masukan Nomor Seri Dokumen' contains the number '34157038' and a 'LACAK' button. Below the form, it states 'Hasil Tracking Dengan Nomor Seri 34157038'. The tracking results are shown in a card with a document icon, the serial number '34157038', and the document title 'Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis'. The status is 'Selesai'. A vertical timeline shows the following steps: 'Selesai' (07 Oct 2020 - 12:19 WIB), 'Proses Pengundangan' (07 Oct 2020 - 12:17 WIB), and five 'Proses Pembahasan' steps at various times on 07 Oct 2020.

Lacak Dokumen Pengajuan Anda

Untuk mengetahui dokumen rancangan peraturan yang anda ajukan, dapat dilihat dengan memasukkan nomor seri yang telah anda terima

Masukan Nomor Seri Dokumen

34157038

LACAK

Hasil Tracking Dengan Nomor Seri 34157038

Nomor Seri: **34157038**

Judul Dokumen: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis

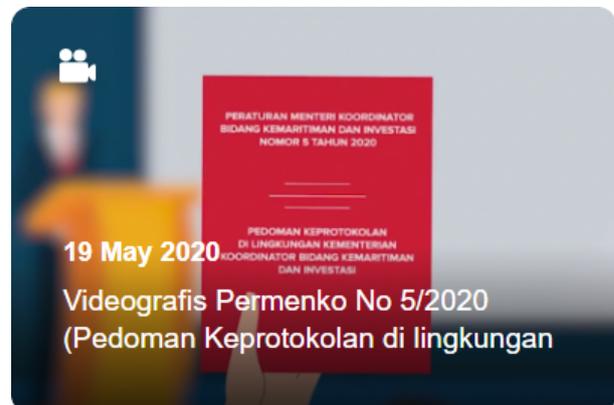
Status: **Selesai**

Lihat Detail

- Selesai
07 Oct 2020 - 12:19 WIB
- Proses Pengundangan
07 Oct 2020 - 12:17 WIB
- Proses Pembahasan
07 Oct 2020 - 12:12 WIB
- Proses Pembahasan
07 Oct 2020 - 12:07 WIB
- Proses Pembahasan
07 Oct 2020 - 12:03 WIB
- Proses Pembahasan
07 Oct 2020 - 11:58 WIB
- Proses Pembahasan
07 Oct 2020 - 11:11 WIB
- Proses Pembahasan
07 Oct 2020 - 11:06 WIB

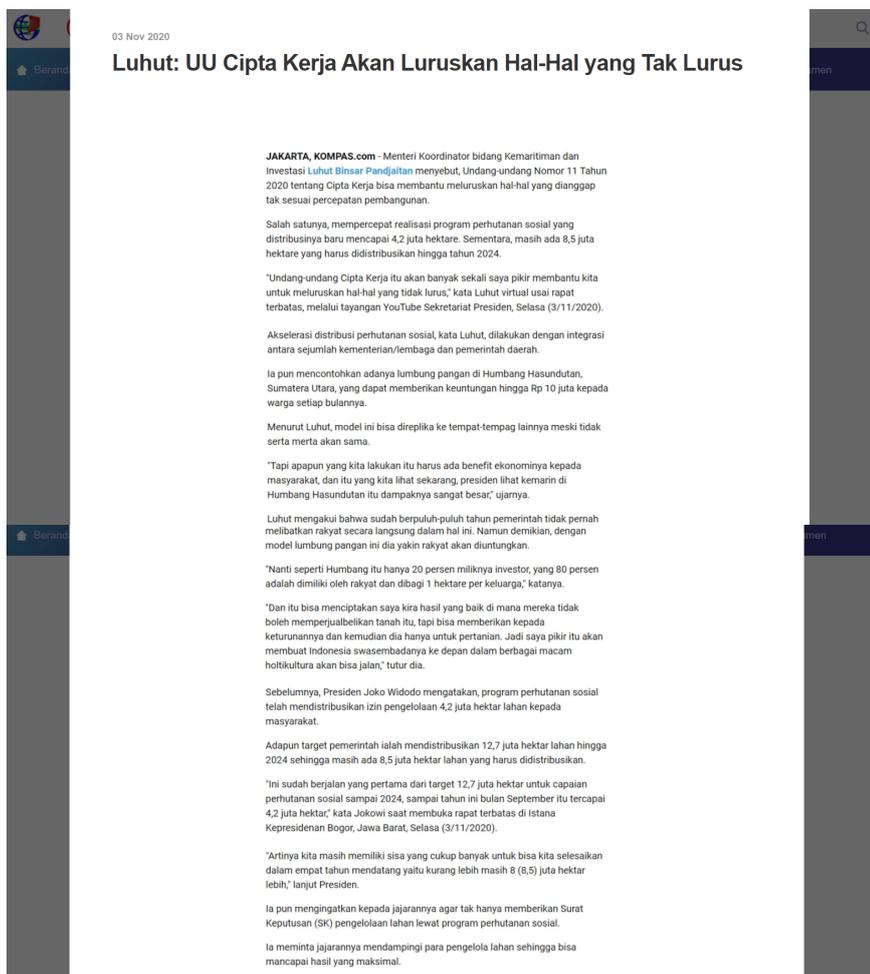
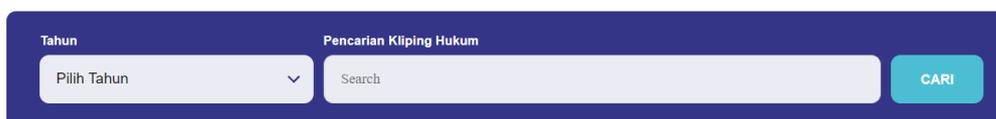
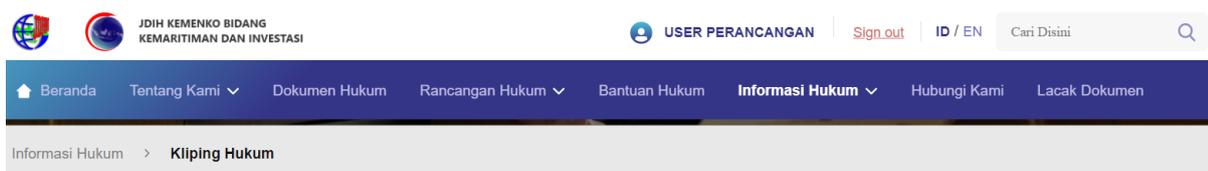
b. Informasi Hukum

Untuk memberikan kemudahan seseorang dalam memahami isi suatu regulasi JDIH Marves melakukan suatu inovasi yaitu menyajikan peraturan ke dalam bentuk videografis dan informasi grafis peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap peraturan yang ada. Saat ini sudah ada 12 (dua belas) peraturan yang sudah disajikan dalam bentuk videografis dan sudah ada 20 (dua puluh) peraturan yang disajikan dalam bentuk informasi grafis.



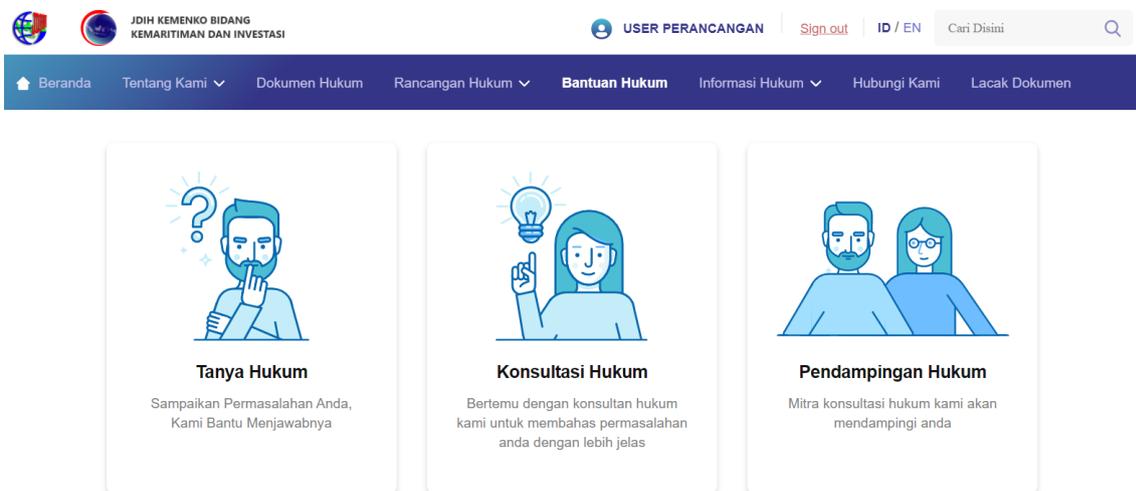
Untuk memberikan informasi atas isu-isu regulasi di bidang kemaritiman dan investasi, JDIH Marves juga melakukan inovasi dengan mengubah kliping hukum yang sebelumnya masih bersifat manual, yaitu dengan menggunakan koran, majalah, atau surat kabar yang di gunting-gunting dan ditempel di atas kertas, saat ini kliping hukum di JDIH Marves sudah merubahnya dengan sistem elektronik.

Elektronik Kliping Hukum atau biasa disebut e-kliping, merupakan kliping yang disajikan dengan sistem yang cukup dengan sistem crop dan cukup dengan melakukan upload file yang ingin disajikan sudah bisa di sajikan kepada para pembaca secara online.

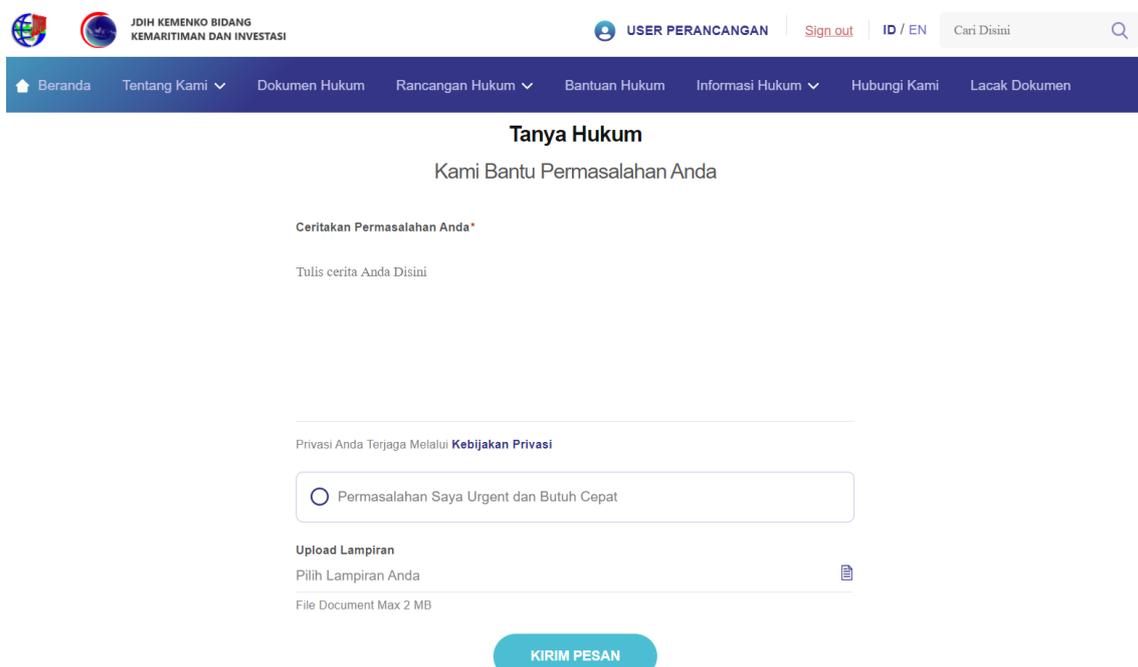


c. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum ini disediakan untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi dan diperuntukan hanya kepada pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Fasilitas yang ada pada fitur bantuan hukum yaitu tanya hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum. Fitur ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan bagi yang mengajukan permasalahan hukum



Tanya hukum merupakan fitur yang disediakan bagi seseorang yang ingin menanyakan permasalahan hukum yang dialami tanpa perlu bertemu, cukup dengan mengirimkan pertanyaan seputar permasalahan hukum kemudian nanti akan di jawab secara email oleh konsultan hukum.



Fitur yang berikutnya Konsultasi Hukum merupakan fitur yang disediakan bagi seseorang yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan konsultan hukum. Fitur ini dapat membuat janji konsultasi dengan mengatur atau membuat janji kapan waktunya ingin berkonsultasi.

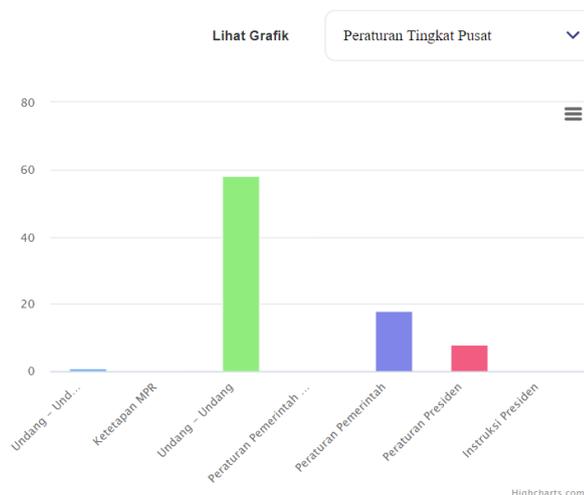
The screenshot shows the 'Buat Janji Konsultasi' (Make Appointment) page. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Ministry of Maritime Affairs and Investment (KEMARITIMAN DAN INVESTASI) and the text 'JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI'. The user is logged in as 'USER PERANCANGAN' and can click 'Sign out' or 'ID / EN'. A search bar is also present with the text 'Cari Disini'. Below the navigation bar, there is a menu with items: Beranda, Tentang Kami, Dokumen Hukum, Rancangan Hukum, Bantuan Hukum, Informasi Hukum, Hubungi Kami, and Lacak Dokumen. The main heading is 'Buat Janji Konsultasi' with the sub-heading 'Bantu kami pahami masalah Anda'. The form includes a 'Durasi Konsultasi*' section with radio buttons for '30 Menit', '60 Menit', and '90 Menit'. The 'Pilih Jadwal Konsultasi*' section has a calendar icon, a dropdown menu for 'Pilih Jadwal Konsultasi', and a dropdown menu for 'Pagi (09:00 - 11:00)'. Below this is a text input field with a radio button and the text 'Saya Ingin Menceritakan Permasalahan Saya'. The 'Ceritakan Permasalahan Anda*' section has the text 'Tulis cerita Anda Disini'. At the bottom, there is a link 'Privasi Anda Terjaga Melalui Kebijakan Privasi' and a large blue button labeled 'BUAT JANJI'.

d. Grafik Peraturan

Grafik Peraturan merupakan fitur yang disediakan untuk memberikan informasi grafik jumlah dokumen dan informasi hukum serta juga untuk memberikan informasi status peraturan. Grafik yang disediakan di dalam fitur ini sebagai berikut:

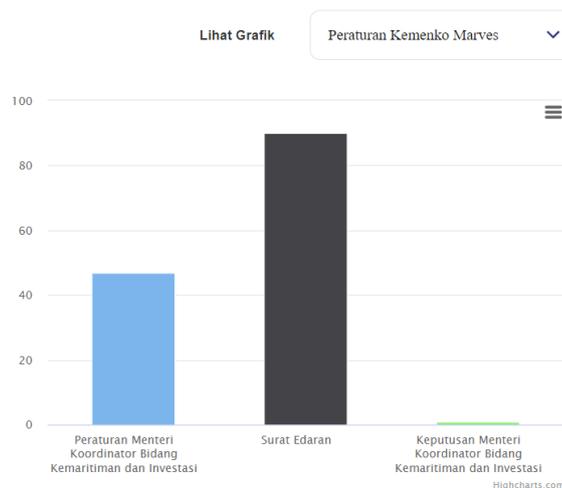
1. Grafik Peraturan tingkat Pusat

No	Jenis	Jumlah
1	Undang - Undang Dasar	1
2	Ketetapan MPR	0
3	Undang - Undang	58
4	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang	0
5	Peraturan Pemerintah	18
6	Peraturan Presiden	8
7	Instruksi Presiden	0



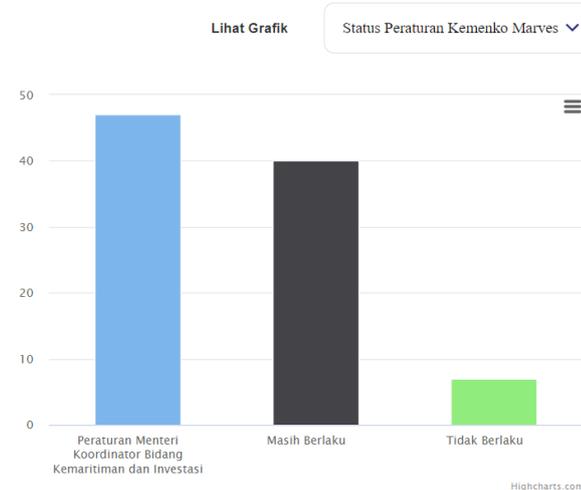
2. Grafik Peraturan di lingkungan Kemenko Marves

No	Jenis	Jumlah
1	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Dan Investasi	47
2	Surat Edaran	90
3	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Dan Investasi	1



3. Grafik Status Peraturan Menko Bidang Marves

No	Jenis	Jumlah
1	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Dan Investasi	47
2	Masih Berlaku	40
3	Tidak Berlaku	7

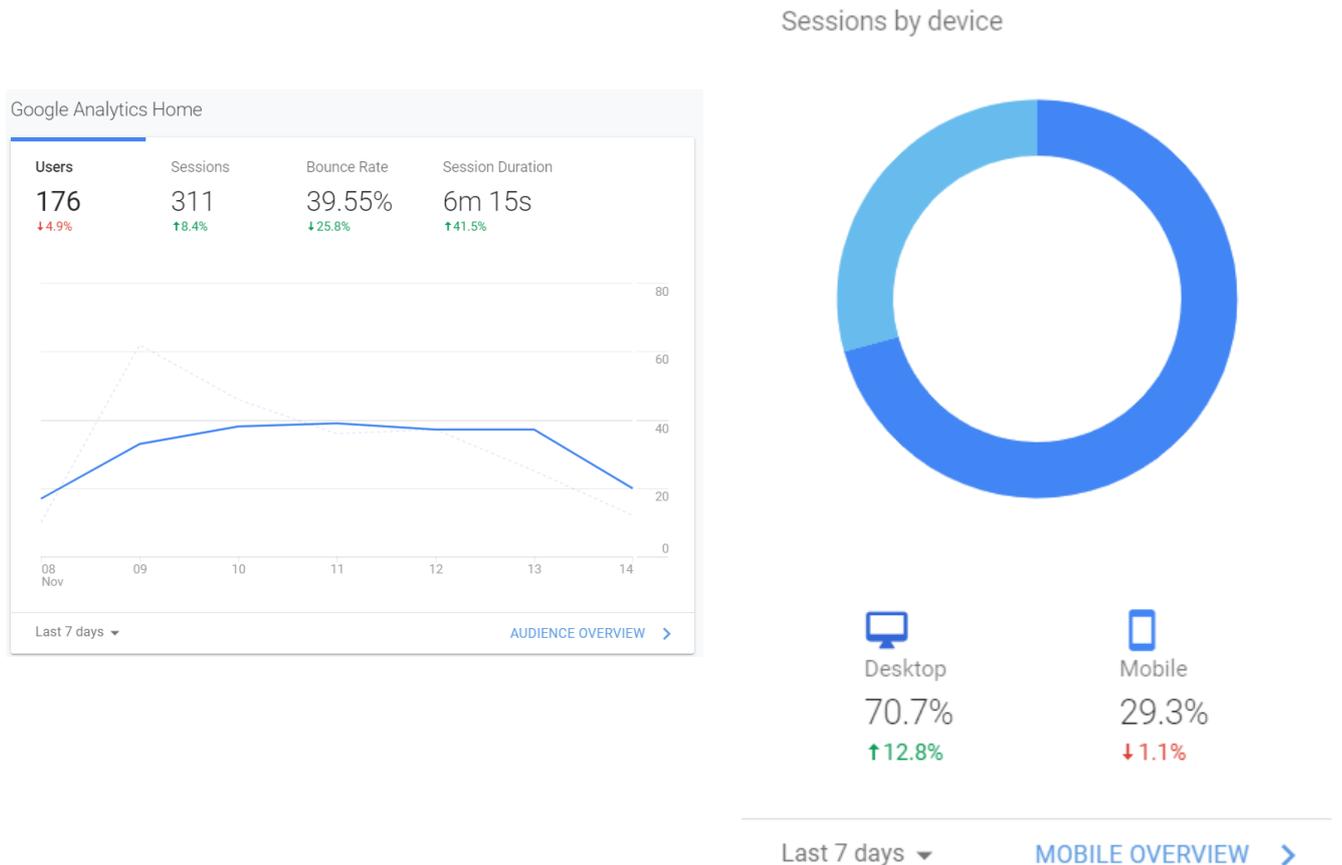


4. Grafik Status Informasi Hukum



e. Google Analytic

JDIH Marves telah difasilitasi google analytics yang berfungsi memantau trafik web, data soal performa sebuah situs mulai dari sumber trafik, data demografi pengunjung, konten populer dan lain-lain. Semua data tersebut dijadikan bahan evaluasi dan analisis dari situs web.



f. JDIH Aplikasi Mobile

JDIH MOBILE

Aplikasi Mobile JDIH Marves dengan UI/UX, memiliki fitur-fitur yang memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen hukum dan dengan Aplikasi Mobile menyajikan notifikasi jika ada peraturan terbaru



Fitur JDIH



Peraturan Terbaru

Peraturan baru yang telah di upload di JDIH Marves, dengan fasilitasi notifikasi pada handphone



Peraturan UU

Tersedia beberapa jenis peraturan perundang-undangan



Tema Peraturan

Tersedia beberapa tema peraturan perundang-undangan



Informasi Hukum

Tersedia informasi hukum seperti buku-buku hukum, galery kegiatan, video, infografis dan majalah hukum

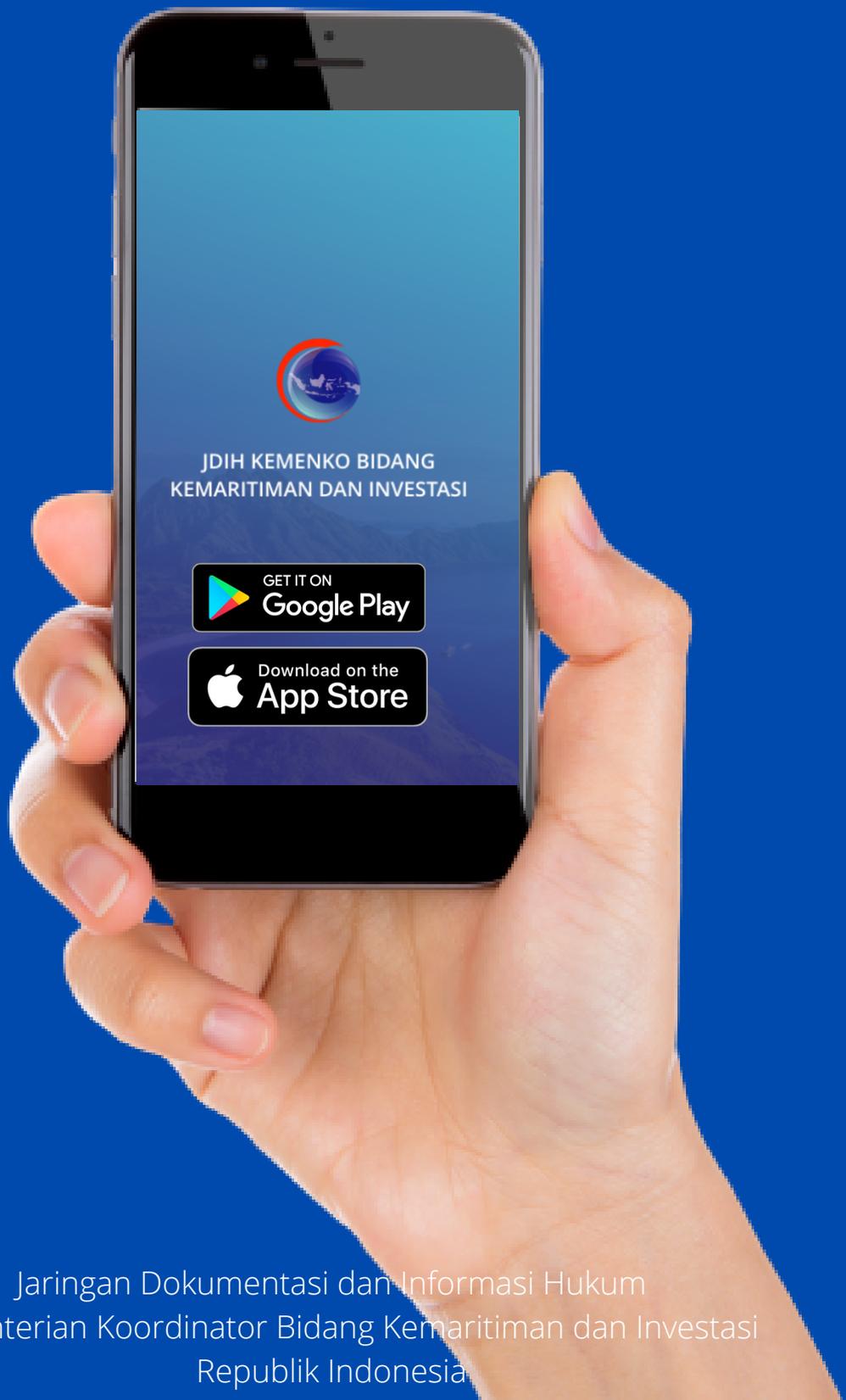
PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH, baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan JDIH Marves Tahun 2020, yaitu:

1. Konsep website JDIH Marves yang tidak hanya sebagai situs yang menyajikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan tetapi situs website yang menyampaikan informasi hukum secara komprehensif dari tahap perencanaan rancangan peraturan, pembahasan, tracking proses, dan fasilitas bantuan hukum memiliki kendala dalam hal ini didasari oleh sulitnya meyakinkan masing-masing pemilik tugas dan fungsi untuk bisa difasilitasi proses bisnisnya melalui website JDIH Marves dan adanya keraguan inovasi yang dilakukan JDIH menyalahi aturan standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019 oleh karena itu pada tanggal 7 Juli 2020 di Ruang Rapat Phinis Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves, Biro Hukum mengadakan rapat saran dan tanggapan atas konsep website JDIH Marves dengan mengundang Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Bapak Yasmon.
2. Proses pengembangan website dan pembuatan aplikasi mobile memiliki kendala dalam hal ini didasari oleh dua pendapat yang berbeda mengenai proses pengadaan barang dan jasa untuk pengembangan website dan pembuatan aplikasi mobile. Sehingga proses pelaksanaan kegiatan yang harusnya dapat dilaksanakan sejak bulan Januari 2020 diundur sampai dengan bulan Juni 2020. Dengan sisa waktu yang tersedia membuat proses pengerjaan harus benar-benar sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan mengingat batas tahun anggaran 2020 yaitu tanggal 15 Desember 2020.
3. Proses pengadaan buku-buku hukum memiliki kendala dalam hal ini didasari proses pengadaan buku-buku yang harus melalui Biro Umum karena pengadaan buku-buku hukum masuk dalam kategori Belanja Modal yang akan menjadi aset, sehingga proses pengadaannya harus melalui Biro Umum. Sedangkan untuk proses untuk dapat dianggarkan di Biro Umum proses pengajuannya belum dipahami alur pengajuannya.
4. Proses pembuatan kontrak pembuatan videografis dan infografis memiliki kendala dalam hal ini didasari oleh proses penghitungan pembayaran pada setiap hasil videografis dan infografis, karena kegiatan ini merupakan sesuatu yang baru dilakukan dalam proses kontrak di Biro Hukum sehingga sulit untuk menentukan penghitungan pembayarannya.

Namun permasalahan dan kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik, sehingga pengembangan website JDIH, pembuatan aplikasi mobile JDIH, pembuatan videografis dan infografis serta pengadaan buku-buku hukum dapat dilaksanakan di tahun 2020.



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia